

# **PDRI SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN TT HARI BELANEGARA: Refleksi dan tindakan\*)**

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
TERIMA TGL. :	20 Juni 2011
SUMBER HARGA :	Hd
OLEKSI :	kl
NO. INVENTARIS :	197 (Hd/2011-p.1 (1)
KLASIFIKASI :	959.81 zed p.1

## **Mestika Zed**

**Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE)**

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang**

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG

**\*)Makalah Pengantar untuk Seminar Sehari Dalam Rangka Peringatan PDRI, Hari Bela Negara 2010**

**Padang, 9 Desember 2010**

## PDRI SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN TT HARI BELANEGARA: Refleksi dan Tindakan.\*)

---

Oleh Mestika Zed

Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE), Universitas Negeri Padang.

**B**ila kita melihat kembali kepada rangkaian peristiwa sejarah antara tahun 1945-1949, yang melahirkan Republik Indonesia (RI) ini, kita mestinya juga memberikan perhatian yang sewajarnya pada suatu episode sejarah yang paling kritis dan sekaligus menentukan dalam lika-liku perjalanan sejarah perjuangan kemerdekaan atau revolusi nasional tersebut. Episode sejarah dimaksud ialah apa yang kita pringati hari jadinya saat ini: Pemerintah Republik Indonesia PDRI. Mengapa episode sejarah itu demikian penting bagi perjalanan sejarah bangsa kita pada waktu itu dan yang secara langsung dan tidak langsung terkait erat dengan Nagari Bidar Alam, Solok Selatan khususnya? Pelajaran apa yang dapat dipetik dari episode sejarah PDRI tersebut?

Dalam risalah sederhana ini saya akan mencoba menjawab kedua pertanyaan di atas dengan memaparkan sekelumit sejarah PDRI secara makro nasional dan kaitannya dengan sejarah lokal di Bidar Alam ini. Untuk itu saya ingin mulai dengan cara yang kurang biasa, yakni mulai dengan akibat dan bukan sebab. Bukankah sebuah kejadian *menjadi* historis (bersejarah) karena akibat yang ditimbulkannya? dan bukan karena sebab itu sendiri. Di sini saya akan membuat jelas, bahwa PDRI penting, bahkan amat penting justru karena ia menyelamatkan Republik dari kehancurannya dan yang membuat Belanda dipermalukan di dunia internasional dan dipaksa mau berunding dan yang membuat pemimpin bisa kembali ke Yogya, ibukota Republik. Dengan kata lain PDRI *mengembalikan gagang ke tampuknya*.

### **Prakondisi.**

Selama hampir lima tahun revolusi nasional, atau sering juga disebut “perang kemerdekaan”, Indonesia senantiasa dirundung krisis perang berkepanjangan. Akan tetapi bulan bulan terakhir tahun 1948 adalah saat terberat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia 1945-1949. Mengapa? Salah satu jawabannya ialah karena Republik yang masih usia *balita* itu ditusuk dari muka dan belakang. Dari muka Republik yang masih muda itu harus berhadapan dengan musuh bersama (*common enemy*): yaitu Belanda. Pada saat yang sama juga ditusuk dari belakang oleh anak-bangsa sendiri, yaitu oleh kelompok komunis (PKI) pimpinan Musso yang mendalangi peristiwa (kudeta) Madiun pada

---

\*) Makalah Pengantar untuk Seminar Sehari dalam rangka Peringatan PDRI, Hari Bela Negara 2010, Padang, 9 Desember 2010.

pertengahan September 1948. Persitiwa Madiun sebagaimana kita ketahui adalah serangkaian upaya kelompok komunis untuk melakukan kudeta pemerintahan Republik yang waktu itu berada di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri.

Dalam keadaan genting akibat pemberontakan yang amat brutal itu, Belanda melaksanakan niatnya menyerang Republik, lebih dikenal dengan istilah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. (Agresi militer pertama Belanda diumumkan bulan Juli 1947). Akibat agresi Belanda kedua itu nyaris fatal. Mengapa? Karena belum pernah terjadi sebelumnya dan juga tidak sesudahnya, kecuali hanya pada masa agresi kedua, ketika ibukota negara jatuh ke tangan musuh, Presiden dan Wakil Presidennya beserta sejumlah menteri ditangkap Belanda pula. Sejak itu Belanda menganggap Republik sudah tamat riwayatnya.

Akan tetapi dalam keadaan kritis itu, kemenangan militer Belanda itu ternyata menjadi sia-sia. Sia-sia karena suatu titik-balik yang tak diduga oleh Belanda, membuat kemenangan militernya menjadi tidak berarti. Suatu pukulan sejarah datang secara serentak dari dua arah. Pertama, dari Yogya dan kedua dari Bukittinggi di Sumatera. Beberapa jam sebelum kejatuhan Yogya atau sebelum penangkapan atas pemimpin Republik di ibukota itu, sebuah sidang darurat kabinet telah diadakan secara tergesa-gesa. Sidang itu akhirnya berhasil mengambil keputusan penting karena Presiden dan Wakil Presiden menyerahkan mandatnya (dalam dokumen disebut "mengoeasakan") kepada Mr. Sjafroeddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. (PDRI) di Sumatera. Jika ikhtiar ini gagal, mandat diserahkan kepada pemimpin Republik di luar negeri (yaitu Dr. Soedarsono, Mr. Maramis dan Palar) untuk membentuk *exile-government* di New Delhi, India.

Kendatipun surat mandat tersebut khabarnya tidak sempat "dikawatkan" karena hubungan telekomunikasi keburu jatuh ke tangan Belanda, naskahnya dalam bentuk ketikan sempat beredar di kalangan orang "Republieken". Namun, untunglah, saat Republik berada dalam keadaan "koma", Mr. Syafruddiddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, yang sedang bertugas di Bukittinggi, dengan sigap menanggapi krisis lewat itu lewat rapat darurat sore hari tanggal 19 Desember 1948, beberapa jam setelah sidang kabinet di Yogya. Rapat darurat di Bukittinggi itu menelorkan gagasan lahirnya PDRI. Dalam perjalanan mengungsi, meninggalkan Kota Bukittinggi tanggal 21 Desember, Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan rombongan singgah semalam di Halaban, sebuah nagari di lereng Gunung Sago, sekitar 13 km dari Kota Payakumbuh. Dini hari tanggal 22 Desember pesonalia Kabinet PDRI disusun. Dengan begitu, vakum kepemimpinan Republik, segera dapat diisi, dan eksistensi Republik secara berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

#### **Eksistensi PDRI.**

Selama lebih kurang delapan bulan keberadaannya (Desember 1948 - Juli 1949), PDRI berhasil menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan alternatif dalam suasana pengungsian. Sesuai dengan sifatnya, darurat, PDRI memimpin pemerintahan secara mobil, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sambil meneruskan perjuangan dengan gerilya. Meskipun dalam keadaan serba berkekurangan, PDRI pada gilirannya memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan pelbagai kekuatan perjuangan yang bercerai-berai di Jawa dan Sumatera dan pada saat yang sama mendorong pemulihan perjuangan diplomasi dengan masyarakat internasional, termasuk dengan Dewan Keamanan PBB.

Sementara itu Belanda meneruskan agresinya, menerobos masuk ke basis pertahanan Republik di seluruh pelosok Jawa dan Sumatera. Di Sumatera Barat khususnya, suasana kacau balau selepas masuk Belanda ke Kototinggi, salah satu basis PDRI di Sumatera Tengah, pada tanggal 10 Januari 1949 berbuntut pada tragedi Situjuh Batur, yang menewaskan sejumlah pemimpin sipil dan militer Sumatera Barat. Sejak itu pemerintahan militer PDRI kembali dikoordinasikan, TNI, polisi dan kekuatan rakyat di kota dan nagari (BPNK) bahu membahu dalam menyusun pertahanan dan keamanan.

Sesungguhnya dalam episode sejarah PDRI inilah, perjuangan kemerdekaan nyata melibatkan semua komponen masyarakat, ketika panggung sejarah revolusi nasional beralih dari kota ke pedesaan, saat perjuangan melibatkan partisipasi rakyat dalam arti sesungguhnya, bukan hanya sekedar pelengkap penderita, melainkan menjadi garda Republik terdepan dalam memberikan dukungan terhadap Republik, baik tenaga, material dan nyawa mereka. Dalam hubungan pula pentingnya kedudukan nagari-nagari di Sumatera Barat, khususnya di 50 Koto dan Solok Selatan sebagai salah satu basis utama dalam perjalanan sejarah PDRI.

#### **Sementara itu di Bidar Alam.**

Mengungsi keluar kota dari Bukittinggi ke Halaban dan seterusnya berjalan kaki mencari tempat bertahan yang aman, para pemimpin PDRI berpencar dalam tiga jurusan yang berbeda. *Pertama*, Mr. Sjafruddin dan rombongan menempuh jalan yang sulit dan berliku-liku melewati kampung-kampung kecil dan hutan-hutan belantara akhirnya sampai di Bidar Alam. *Kedua*, Mr. Moh. Rasjid, Gubernur Militer Sumatera Barat yang sekaligus menduduki posisi menteri dalam Kabinet PDRI akhirnya memilih lokasi di Kototinggi dan akhirnya yang ketiga, rombongan militer di bawah Kol. Hidayat, Panglima Sumatera, terus meneruskan melakukan pergerakan *long march* sepanjang garis pertahanan Sumatera sambil mengkoordinasikan pertahanan militer sampai ke utara di Banda Aceh dan daerah Palembang dan Bengkulu di selatan.

Dengan demikian, dalam perkembangannya terdapat dua basis pemerintahan (di Bidar Alam dan Kototinggi), di samping basis pertahanan militer, yang selain terkonsentrasi di kedua basis utama PDRI itu juga tersebar di hampir seluruh daerah di Jawa dan Sumatera. Mr. Sjafruddin, dalam posisinya sebagai Ketua PDRI yang memimpin Kabinet PDRI, memimpin roda pemerintahan di Bidar Alam. Mengadakan kontak-kontak dengan pemimpin PDRI di Jawa, termasuk dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang tunduk di bawah kepemimpinan PDRI. Bekat alat komunikasi radio sederhana dengan teknisinya yang tekun dan cekatan, hubungan-hubungan ke luar negeri pun bisa dibangun. Ini kemudian membangkitkan kembali perjuangan Republik di luar negeri dan yang mendorong terjadinya penyelesaian konflik Indonesia-Belanda lewat rangkaian perundingan perundingan.

Mr. Sjafruddin dengan sekitar 39 orang anggota rombongan PDRI sudah mencapai Bidar Alam sekitar tanggal 24 Januari 1949. Dengan bantuan penduduk setempat mereka mereka dipersilakan menempati rumah-rumah penduduk dan diruruskan lostik mereka. Sekitar tiga bulan tinggal di Bidar Alam, Sjafruddin dan rombongan PDRI menjadikan negeri itu sebagai basis kegiatan Kabinet PDRI. Sejak kedatangan orang PDRI itu, keamanan negeri sangat diperketat. Wali Nagari Perang, H. Ali Dt. Rajo Alam, diperintahkan untuk melaksanakan wajib ronda malam secara bergiliran bagi setiap pemuda di bawah pengawasan tentara. Jumlah pos-pos penjagaan pun diperbanyak dan di tempat-tempat yang dianggap rawan

dari infiltrasi musuh, khususnya di tepi Muaro, yang merupakan "pintu keluar-masuk" negeri, pemusatan tenaga ronda diperketat. Barisan BPNK yang pernah dibentuk beberapa bulan sebelumnya diaktifkan kembali. Semuanya langsung di bawah pengawasan Idris Batangtaris, salah seorang perwira militer yang ikut rombongan PDRI dari Bukittinggi.

Bidar Alam pada masa revolusi tentu merupakan daerah terpencil dan relatif aman dari gangguan musuh. Dengan begitu, di samping menjalankan tugasnya memimpin pemerintahan, melakukan koordinasi dan kontak-kontak ke semua jajaran pemerintah sipil dan militer, Sjafruddin dan anggota badan pemerintahan PDRI juga mengisi waktunya dengan pelbagai kegiatan seperti kursus-kursus politik, pengajian, pengobatan dan kunjungan ke tempat-tempat tertentu. Sudah barang tentu banyak kenangan suka dan duka selama keberadaan pemimpin PDRI di negeri Bidar Alam, dan hubungan baik antara pemimpin PDRI dengan penduduk setempat hanya mungkin tercipta karena ketulusan memikul tanggung jawab bersama atas kecintaan kepada negara dan bangsa dan terbinanya kepercayaan dan saling pengertian yang dalam antara pemimin dan yang dipimpin.

Sjafruddin dan rombongan kemudian meninggalkan Bidar Alam sekitar 22 April 1949, yakni setelah hidup dalam suasana darurat di tempat pengungsian di sana selama lebih kurang tiga bulan. Negeri itu terpaksa ditinggalkan ketika daerah sekitarnya mulai terancam serangan musuh: terutama sejak front Muara Labuh dibom Belanda tanggal 19 Februari. Kejadian itu khabarnya hanya beberapa jam saja setelah Sjafruddin meninggalkan tempat itu. Bagian keamanan segera memperingatkannya agar rombongan PDRI menyingkir, mencari tempat pengungsian baru, yang lebih aman.

Selain itu, berkaitan dengan adanya berita-berita tentang pendekatan perundingan yang sedang diprakarsai oleh kekuatan internasional dengan kelompok Bangka, yaitu pemimpin Republik yang ditawan Belanda di Bangka. Sjafruddin, seperti juga kebanyakan pemimpin PDRI yang sedang bergerilya di Sumatera dan di Jawa sangat marah mendengar berita itu. Dari Bidar Alam Sjafruddin merasa perlu mengambil inisiatif bersama. Yaitu dengan mengadakan konsolidasi sesama pemimpin PDRI di Sumatera Tengah. Untuk tujuan itu Sjafruddin harus meninggalkan Bidar Alam dan seterusnya berangkat menuju negeri Sumpur Kudus, tempat di mana nantinya diadakan Musayarah Besar PDRI antara anggota rombongan yang di Bidar Alam dan PDRI Kototinggi.

## Penutup

Setelah keadaan kembali "normal" pada pertengahan Juli 1949, Sjafruddin Prawiranegara yang tinggal untuk sementara di Koto Kociek, Talago tatkala dijemput oleh utusan dari Yogya. Sejak itu kekuasaan Republik dapat dipulihkannya kembali bersamaan dengan kembalinya para pemimpin ke ibukota Republik Perundingan-perundingan berikutnya (KMB) tinggal menunggu waktu kemablinya kedaulatan Republik ke pangkuan ibu pertiwi dan sejak itu Indonesia mulai memasuki alam merdeka.

Merenungkan kembali episode sejarah 56 tahun yang lalu itu amat banyak pelajaran sejarah yang bisa dipertik. Di sini saya akan mengemukakan beebbrapa butir saja.

*Pertama*, sejarah PDRI dalam satu dan lain hal adalah batu ujian pertama bagi keutuhan negara *nasional* karena perjuangan kemerdekaan pada masa itu akhirnya berhasil melewati

959.81

Zed

P.1

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG

ujian terberat setelah mengalami ancaman disintegarsi bangsa, ketika agresi militer Belanda membuat kekuatan Republik bercerai-berai, tetapi tetap bersatu. Episode PDRI dengan jelas juga menunjukkan betapa partisipasi rakyat lokal memainkan peran sentral, sebab jika pemimpin yang mengungsi ke pedalaman itu tidak dijamin keselamatan nyawanya oleh rakyat atau kalau tidak disubsidi makannya oleh rakyat, niscaya nasib mereka hilang ditelan sejarah. Sesungguhnya, bahwa rakyat pada masa ini bukan lagi hanya sekedar pelengkap penderita dalam perjuangan nasional, melainkan sebagai *primemover* (penggerak utama) yang menentukan di tingkat *grass-root* dalam menghadapi krisis nasional.

Kedua, meminjam kata-kata sejarawan terkemuka negeri ini, Prof. Sartono Kartodirdjo, "PDRI adalah soal *to be or not to be* Republik. Tanpa PDRI, Republik yang diproklamasikan beberapa tahun sebelumnya itu, nyaris tenggelam buat selama-lamanya. Namun berkat PDRI, Republik bisa kembali ke Yogya. Dengan kata lain, PDRI mengembalikan "gagang ke tampuknya".

Akhirnya yang ketiga, soal *the ethic of power* (etika kekuasaan). Meskipun PDRI dibentuk dan didukung sepenuhnya oleh pemimpin Sumatera Barat, hanya sedikit saja tokoh Sumatera Barat yang duduk dalam kepemimpinan puncak tanpa merasa perlu mengklaim diri mereka sebagai "Putra asli PDRI". Lebih penting lagi, betapa Sjafruddin dan pemimpin Sumatera Barat dengan kerelaan dan penuh patriotisme bersedia menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemimpin di Yogya, meskipun, mereka pada taraf tertentu telah dilangkahi oleh pemimpin "terrace" Bangka yang ditawan Belanda dalam mengambil keputusan-keputusan penting mengenai negara dan bangsa lewat perundingan tanpa membawa nama PDRI. Padahal, kalau mereka mau, mereka sebenarnya bisa dan mampu menahannya atau tidak menyerahkan PDRI ke Yogya. Namun itulah soalnya, zaman berubah dan nilai-nilai pun bergeser, sehingga nasionalisme ke-Indomesiaan makin dikalahkan oleh nilai-nilai materialistik dan egois sektoral yang makin menggegoti bangsa kita dewasa ini.

Mengingat pentingnya peran sejarah PDRI dalam perjalanan sejarah bangsa, maka sudah selayaknya sejarah perjuangan era PDRI dijadikan sebagai hari bersejarah nasional, yang mengukuhkannya sebagai simbol pengikat integrasi bangsa di tingkat nasional, dan sekaligus menghidupkan kembali tali persaudaraan solidaritas di tingkat lokal, yang belakangan ini cenderung makin kabur dalam memori kolektif generasi bangsa. \*\*\*

Padang, Desember 2010

MTZ